

# MEMBUMIKAN KEMBALI AJARAN MARHAENISME



*Percikan Pemikiran Seorang Soekarno's*

Antonius Fokki Ardiyanto





# **MEMBUMIKAN KEMBALI AJARAN MARHAENISME**

Percikan Pemikiran Seorang Soekarno

Oleh: **Antonius Fokki Ardiyanto**

©ALL RIGHTS RESERVED

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Editor: Jafarudin

Pemeriksa Aksara: Mumtdz Faeyza

Perancang Sampul: Muadz Fadi

**Katalog Dalam Terbitan (KDT)**

**ISBN: 000-000-00000**

Cetakan Pertama, Januari 2024

## **PENERBIT:**

PT Media Wartatama Berdikari

Jl. Cangkringan Km. 1,5 Tirtomartani, Kalasan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta | Email: [wartatama@gmail.com](mailto:wartatama@gmail.com) | Telepon: 089674669111 | website:<https://mediawartatama.com/>

## PENGANTAR PENULIS

---

**N**ama Ir. Soekarno atau Bung Karno sebagai Proklamator, Bapak Bangsa Indonesia dan Presiden Pertama Republik Indonesia memang tidak lekang oleh waktu. Namun di sisi lain, pemikiran-pemikiran Bung Karno dewasa ini kian hari kian memudar. Masyarakat Indonesia bahkan dunia yang mengenal Nama besar Bung Karno, ternyata tak berbanding lurus dengan pemahamannya akan ajaran murni Bung Karno, yaitu Marhaenisme. Bahkan, Marhaenisme yang sejatinya embrio Pancasila ini sepertinya asing bagi kalangan milenial dan generasi Z (Gen Z). Para pewaris peradaban bangsa ini banyak yang tak lagi mengenal apa itu marhaenisme apalagi bisa melaksanakannya.

Selama 32 tahun Rezim Orde Baru (ORBA) Berkuasa di Bawah Kepemimpinan Soeharto, memang nyaris menenggelamkan ajaran-ajaran Bung Karno. Stigmatisasi negatif terhadap Bung Karno dengan segala manifestasinya dilekatkan begitu kuat di benak rakyat Indonesia. Marhaenisme dicap layaknya ajaran sesat. Ironisnya, paska tumbanganya penguasa otoriter itu, Marhaenisme belum juga sepenuhnya bangkit, terlebih membumi kembali di hamparan ibu pertiwi ini.

Memang bukan hal yang mudah untuk meluruskan sejarah, terlebih ketika sejarah itu sudah terlampau parah terdistorsi atau diselewengkan. Distorsi penulisan historiografi Bung Karno di masa ORBA tidak saja tentang pribadinya, melainkan juga atas pemikirannya. Distorsi tersebut lebih luas lagi karena kalangan sejarawan ORBA sejak awal memang tidak menyukai Bung Karno.

Mereka kerap menuliskan data sejarah yang bertentangan dengan referensi yang original, yang bahkan ditulis Bung Karno Sendiri dan sudah banyak diketahui publik. Pada eksekusinya, citra Bung Karno menjadi terkesan buruk.

Hal yang paling mengerikan adalah bahkan Pancasila yang sebenarnya ideologi terbuka menjelma ideologi tertutup di era ORBA dengan otoritarianismenya. Menggurutannya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di dalam lingkaran kroni ORBA yang bahkan tak tersentuh hukum, menunjukkan betapa bergesernya nilai-nilai Pancasila dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Lebih dari itu, bahkan telah mengingkari narasi besar ORBA yang konon adalah untuk mewujudkan Sebuah tatanan negara dan bangsa yang didasarkan atas pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsisten. ORBA yang katanya adalah sebuah tatanan yang berusaha mewujudkan cita-cita kemerdekaan, yaitu keadilan dan kemakmuran rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila. ORBA yang menyebut diri sebagai sebuah tatanan yang bercita-cita membangun sistem negara dan masyarakat berdasarkan UUD, demokrasi dan hukum. Jargon orba sebagai sebuah tatanan hukum dan tatanan pembangunan adalah jargon yang hanya sebatas sampai tenggorokan dan tak terwujud dalam kenyataan.

Pancasila di Zaman ORBA bukan lagi menjadi ideologi terbuka yang memerdekakan manusia dari segala aspeknya. Soeharto menjadikan Pancasila sebagai azas tunggal, sejatinya mengkhianati Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang inklusif. Soeharto dengan sedemikian rupa menjadikan Pancasila sebagai alat politik untuk melanggengkan kekuasaannya. Tak hanya marxisme yang dianggap sumber komunisme yang

diberangus, bahkan ideologi-ideologi yang bersumber dari ajaran agamapun pada akhirnya disingkirkan.

Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai dasar dan nilai instrumental yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan dinamika secara internal.

Ideologi terbuka adalah pendekatan atau konsep yang mengakui dan menerima adanya variasi, perbedaan, dan keberagaman dalam ideologi, keyakinan, nilai-nilai, dan pandangan politik. Prinsip dasar dari ideologi terbuka adalah bahwa tidak ada satu ideologi tunggal yang benar atau sempurna, dan bahwa masyarakat harus menerima dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di dalamnya. Dalam konteks politik, ideologi terbuka mendorong dialog, toleransi, dan inklusi. Ide ini menghargai kebebasan individu untuk memilih dan mengembangkan pandangan mereka sendiri tanpa adanya penindasan atau pemaksaan dari pemerintah atau kelompok lainnya. Ideologi terbuka juga menghormati hak setiap orang untuk mempraktikkan agama, berekspresi, dan berpartisipasi dalam proses politik dengan bebas. Prinsip ideologi terbuka menekankan pentingnya mendengarkan pandangan dan pengalaman orang lain serta berusaha untuk mencapai pemahaman yang lebih baik melalui dialog dan diskusi yang konstruktif. Hal ini berbeda dengan ideologi tertutup atau dogmatis, yang cenderung menolak atau mengabaikan pandangan alternatif atau berupaya memaksakan pandangan mereka kepada orang lain, sebagaimana yang dipraktikkan Orde Baru.

Pemberangusan ajaran Bung Karno atau De-Soekarnoisasi ditambah dengan dijadikannya Pancasila sebagai azas tunggal era Soeharto memang membuat jurang yang teramat dalam dan lebar antar generasi. Karenanya tak mudah untuk membangun jembatan yang kokoh untuk memberikan jalan yang leluasa bagi generasi saat ini untuk melihat fakta sejarah di masa lampau secara objektif. Penafsiran Pancasila oleh Rezim ORBA yang dilakukan secara terus menerus dan konsisten sepanjang 32 tahun berkuasa memang cukup berhasil untuk mendistorsi sejarah tentang Bung Karno, terutama pada pemikiran dan cita-cita mulianya untuk masa depan dan kejayaan Bangsa Indonesia yang terangkum dalam Marhaenisme.

Sebagai manusia biasa, Bung Karno tentu saja tak luput dari kesalahan karena hanya Tuhan yang Maha Benar. Tetapi kesalahan Bung Karno tentu saja tidak seperti yang digambarkan rezim Orde Baru (ORBA) secara kejam, yang jelas tidak sebanding dengan pengorbanan Bung Besar (Bung Karno) untuk kemerdekaan Indonesia.

Reformasi 98 membawa angin segar untuk kebangkitan kembali Marhaenisme. Ide-ide besar Bung Karno mulai mengemuka terutama di kalangan Kader-Kader 'Banteng' Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan). Referensi tentang pemikiran-pemikiran Bung Karno yang mewujud dalam Marhaenisme bertebaran. Namun tidak bisa dinafikan pula bahwa ulasan-ulasan tentang Marhaenisme di banyak media, khususnya media daring saat ini lebih diwarnai tulisan romantisme sejarah.

Romantisme berkepanjangan ini senyatanya tetap tidak bisa membuat negara ini maju, sesuai cita-cita Bung Karno yang

dituangkan dalam ajaran Marhaenisme. Masih banyak yang merasa seorang Marhaenis, namun selalu mendefenisikan secara sempit arti kata 'Perubahan'. Perubahan dianggap harus membuang semua masa lalu yang telah dicapai. Sehingga segala yang telah dibangun generasi sebelumnya seakan-akan tidak berarti dan serba salah serta tidak layak untuk dilanjutkan. Romantisme sejarah akan membuat seolah Marhaenisme tak lebih catatan yang usang dan hanya layak menjadi pajangan di "museum peradaban". Marhaenisme seakan penggalan kisah masa lalu yang hanya bisa diimplementasikan di era Bung Karno.

Walau begitu, kesalahan tidaklah layak ditudingkan kepada generasi saat ini. Milenial dan Gen Z, tidak sepenuhnya ahistoris atau apatis. Sebab pada dasarnya generasi muda secara alamiah adalah golongan kritis yang memiliki elan vital (daya dorong) untuk membuat sebuah perubahan. Membentuk kesadaran kepada generasi kini bahwa Marhaenisme relevan dengan segala zaman memerlukan literasi yang lebih beragam tanpa mengurangi esensi dari nilai-nilainya. Generasi Milenial dan Gen Z tidak sekadar membaca referensi, tapi juga memerlukan bukti atau contoh aksi nyata bahwa nilai-nilai marhaenisme memang bisa menyelesaikan problem bangsa Indonesia saat ini.

Jangankan kalangan milenial dan gen Z yang di luar PDI Perjuangan, bahkan tidak ada jaminan kader-Kader 'Banteng' PDI Perjuangan juga benar-benar menjadi soekarnoisme sejati yang dengan sadar dan konsisten mengamalkan ajaran marhaenisme.

Perlu digarisbawahi bahwa menjadi Soekarnoisme tak cukup sekadar menunjukkan symbol. Memajang foto Bung Karno,

memakai atribut-atribut Bung Karno atau bergaya penampilan seperti Bung Karno. Itu bukanlah parameter seseorang adalah Soekarnoisesejati. Bahwa menunjukkan identitas dengan penampilan itu tidak salah, namun akan lebih baik tak hanya tampak di permukaan, namun juga sungguh-sungguh menjiwai ajaran Marhaenisme.

Diakui atau tidak, kebanyakan Kader-Kader PDI Perjuangan lebih memaknai Bung Karno sebagai politisi handal. Tentu saja itu tidak salah, bahkan bisa dijadikan motivasi agar lebih percaya diri dalam memenangkan PDI Perjuangan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dengan berbagai cara yang konstitusional.

Namun perlu ditekankan bahwa Bung Karno adalah sosok yang lengkap. Ia bukan hanya pejuang kemerdekaan, politisi, tapi juga seorang intelektual bahkan ideolog. Pada titik ini, jelas akan menjadi ironis jika kader-kader PDI Perjuangan yang mengaku Soekarnoisesejati mengesampingkan tauladan Bung Karno sebagai intelektual.

Justru karena intelektualisme Bung Karno yang melahirkan Marhaenisme sebagai embrio Pancasila, sehingga mendorong rakyat Indonesia tercerahkan dan menjadi 'Banteng-Banteng' Tangguh yang mengantarkan PDI Perjuangan di bawah kepemimpinan Ibu Ketua Umum, Megawati Soekarno Putri memenangkan Pemilu sejak pasca reformasi. Bahkan, dalam dua dasawarsa terakhir PDI Perjuangan berada di puncak parlemen dan berhasil mengantarkan kader terbaiknya, Ir. H. Joko Widodo menjadi Presiden ke RI ke 7.



Optimisme untuk kembali memenangkan Pemilu ke 3 kalinya (hattrick) pada Pemilu 2024 tentunya harus dibangun. Seharusnya bukan hanya hattrick, tapi menang seterusnya sehingga bisa selalu mengawal peradaban Indonesia kembali ke masa jayanya, menjadi negara maju dan di segani dunia, sebagaimana cita-cita Bung Karno. Untuk mencapainya, tentu saja Marhaenisme menjadi sesuatu yang penting untuk tetap konsisten dibumikan kepada generasi muda saat ini dan untuk masa yang akan datang.

Kepentingan politik terbentuk atas satu kesamaan ideologi tertentu. Ideologi menjadi acuan bagi setiap kader partai dalam melaksanakan nilai-nilai ideologi tersebut menjadi program, kegiatan atau aktifitas partai di dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian, ideologi kerap kali tidak dijadikan pedoman dalam pembuatan kebijakan, ideologi masih dipandang sebagai sesuatu yang sifatnya abstrak.

Ideologi Marhaenisme yang digagas oleh Bung Karno serta bentuk penerapannya oleh kader-kader PDI Perjuangan senyatanya belum sepenuhnya optimal dan membuahkan hasil yang semestinya. Banyaknya kursi di parlemen, bahkan jabatan eksekutif, yaitu presiden belum secara massif membumikan marhaenisme.

Bentuk penerapan nilai-nilai Marhaenisme yang dilakukan oleh kebanyakan kader PDI Perjuangan belum banyak mencerminkan sebuah pemahaman yang komprehensif. Dalam melaksanakan arahan dan perintah partai kepada petugas partai di Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) arau

DPRD misalnya, yaitu untuk memperjuangkan kesejahteraan sosial, pembangunan manusia, pertanian, UMKM dan infrastruktur yang berpihak kepada kaum marhaen belum sepenuhnya optimal.

Corak keberpihakan PDI Perjuangan terhadap kaum marhaen bukan sekadar menghadirkan undang-undang atau peraturan daerah semata, melainkan juga bagaimana mengimplementasikannya dalam aksi nyata. Seringkali di mata masyarakat, PDI Perjuangan yang sejak reformasi selalu menjadi pemenang Pemilu, lebih menunjukkan praktik-praktik politik praktis yang melulu hanya merebut kekuasaan, minus aksi nyata bagaimana membumikan kembali Marhaenisme yang selama 32 tahun Orde Baru berkuasa coba dilenyapkan.

Padahal, posisi politik PDI Perjuangan di seluruh negeri, baik DPR RI maupun DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota banyak mendominasi. Namun kerja-kerja politik PDI Perjuangan yang melibatkan para pemangku kepentingan atau mitra kerja agar kebijakan serta anggaran dapat difokuskan kepada kesejahteraan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, tidak diimbangi dengan kerja ideologis. Faktanya Marhaenisme belum membumi.

Tak sedikit yang beranggapan bahwa mengajarkan dan membumikan Marhaenisme seolah hanya menjadi tugas intelektual, bukan politisi. Nilai-nilai ajaran bung Karno seakan sudah secara otomatis bisa tertanam dan dilaksanakan rakyat cukup dengan merebut kekuasaan dalam Pemilu. Itulah yang menyebabkan hingga saat ini generasi muda masih banyak yang menafsirkan keliru apa itu marhaenisme. Betapa Marhaenisme sebenarnya masih belum bangkit pasca ORBA tumbang tercermin

dalam pernyataan Pidato Ibu Ketua Umum PDI-Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri pada puncak acara Bulan Bung Karno, di Stadion Utama GBK, Senayan, Jakarta, Sabtu 24 Juni 2023 yang lalu.

Ibu Megawati menyatakan meminta agar masyarakat jangan menyamakan Marhaenisme dengan komunisme atau paham Partai Komunis Indonesia (PKI).

"Jangan dikatakan kalau saya bilang Marhaen itu lalu komunis," tegasnya mengingatkan puluhan ribu kader PDI Perjuangan yang hadir dan jutaan rakyat Indonesia yang menyaksikan lewat siaran televisi maupun kanal-kanal media sosial.

Dalam momen dimana penulis juga hadir selaku Kader PDI Perjuangan, ada kalimat yang cukup menggelitik dan menjadi perenungan ketika Ibu Megawati mengultimatum kader PDI Perjuangan agar belajar kembali tentang hari lahir Pancasila. Kurang lebihnya beliau mengatakan,

"Pada waktu yang lalu pun, Pancasila itu sepertinya diredupkan, diplesetkan. Makanya, harus semua yang namanya anggota PDI Perjuangan belajar lahirnya Pancasila," serunya pada waktu itu.

Tentu di sisi lain, seruan Ibu Megawati menjadi tampanan bagi Kader-Kader PDI Perjuangan yang seharusnya memahami Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) Partai. Kader PDI Perjuangan sedianya memahami bahwa asas

partai yang tercantum dalam AD/ART adalah Pancasila dengan jiwa dan semangat kelahirannya pada 1 Juni 1945 dengan nilai Marhaenisme sebagai intisari dari lima prinsip pokok dalam Pancasila.

Lebih dari itu Merujuk pada AD/ART PDI Perjuangan hasil Kongres PDI Perjuangan tahun 2015-2020 Bagian Keempat Pasal 10 huruf c yang berbunyi “menjabarkan, menyebarluaskan dan membumikan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;”

Apa yang disampaikan Ibu Megawati ditambah amanat AD/RT tersebut semakin mengukuhkan tekad penulis untuk menyelesaikan buku yang sebenarnya sudah lama berproses ini. Buku yang penulis beri judul : “Membumikan Kembali Ajaran Marhaenisme: Percikan Pemikiran Soerang Soekarno” ini penulis harapkan bisa menjadi tambahan literatur bagi generasi muda untuk lebih memahami Marhaenisme yang merupakan akar dari Pancasila dan dicetuskan oleh Bung Karno.

Menurut Penulis, membumikan kembali pemikiran Bung Karno, khususnya ajaran Marhaenisme adalah sebuah keniscayaan jika bangsa Indonesia ingin mencapai cita-cita Kemerdekaan sejati. Membentuk gerasi Soekarno yang sekaligus menjiwai soekarnoisme menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi di setiap zaman, sehingga mimpi Indonesia emas pada 2045 sebagai bangsa maju, bukan sekadar angan-angan.

Menurut hemat penulis, Soekarno artinya pengagum ajaran Bung Karno dan Soekarnoisme adalah sebagai pengikut

paham dari Soekarno. Penulis memang lebih merasa sebagai seorang Soekarno, karena untuk benar-benar menjadi seorang Soekarnoisme benar-benar memerlukan pemahaman yang berkelanjutan serta tentu saja mewujudkannya dalam aksi nyata. Saat ini penulis dalam proses menuju menjadi seorang Soekarnoisme.

Generasi milenial dan Generasi Z saat ini lebih banyak terpengaruh oleh media sosial yang tidak beraturan dan kurang mendapatkan pemahaman yang mendalam dari bacaan dan literasi. Dengan buku ini, penulis berharap bisa mengajak generasi muda untuk menjadi Soekarno yang sekaligus Soekarnoisme.

Generasi muda bangsa Indonesia perlu diingatkan kembali bahwa Presiden pertama Republik Indonesia ini merupakan sosok yang tak hanya dihormati di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Banyak negara di Dunia yang mengabadikan Namanya sebagai symbol penghargaan kepada sosok yang memperjuangkan perdamaian dunia dan menyatukan bangsa-bangsa di Asia Tenggara.

Di Mesir Bung Karno diabadikan sebagai nama jalan Ahmed Soekarno St di daerah Agouza, Giza. Penamaan ini dikarenakan kedekatan hubungan Indonesia dan Mesir. Meskipun jauh, Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Selain Mesir, jejak sejarah pengabdian nama Soekarno terdapat di Kuba, Pakistan, Maroko, Thailand, dan Hongkong.

Jadi sudah seharusnya generasi muda saat ini lebih bangga dengan Bung Karno, sosok super hero sesungguhnya yang nyata,

bukan tokoh fantasi. Ini perlu penulis tekankan mengingat Generasi Milenial terutama Gen Z yang lebih mengidolakan super hero yang sebenarnya hanyalah sosok imajiner.

Generasi muda perlu diingatkan bahwa sepanjang hidupnya, Bung Karno dengan Marhaenisme yang ia cetuskan, telah mendikasikan seluruh hidupnya untuk bangsa Indonesia. Ia menunjukkan kepahlawanan yang nyata sehingga membawa generasi saat ini hidup dalam ruang dan waktu yang lebih baik, terlepas dari belenggu penjajahan.

Melalui buku yang ini, penulis juga ingin mengingatkan sekaligus menegaskan kepada generasi muda bangsa Indonesia yang kelak akan mengambil estafet kepemimpinan bangsa agar JAS MERAH ! (Jangan Sekali-Kali Melupakan Sejarah).

Pada buku Soekarno Muda Biografi Pemikiran 1926-1933 (2014: 41), Peter Kasenda mengatakan, pemikiran Bung Karno didasari oleh sikap antikapitalisme dan antikolonialisme. Hal inilah yang kemudian melahirkan pemikiran dan penekanan Bung Karno terhadap persatuan nasional dan pembelaan terhadap rakyat kecil. Kedua hal tersebut memang menjadi persoalan yang tak hanya dihadapi Bung Karno di zamannya, melainkan juga persoalan bangsa yang masih kita hadapi saat ini.

Tergerusnya Maehenisme sebagai ajaran mulia Bung Karno justru melemahkan sendi-sendi berbangsa. Sebab, marhaenisme adalah suatu asas perjuangan untuk melawan segala bentuk penjajahan, penindasan Kolonialisme, Kapitalisme, dan

Imperialisme. Itu jelas sejalan dengan semangat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Atas terbitnya buku ini Penulis menyampaikan erimakasih kepada Mas Jafarudin atau akrab saya sapa Mas Fafa yang membantu mengedit tulisan penulis. Terimakasih yang dalam penulis sampaikan kepada para senior dan kawan-kawan di PDI Perjuangan, Kawan-Kawan Relawan Pejuang Demokrasi (Repdem), Kawan-Kawan Keluarga Besar Marhaenis (KBM) DIY, Kawan-kawan Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) DIY, Kawan-Kawan Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI), Ikatan Perempuan Mawar Merah, Kawan-Kawan Brayat Fokki dan semua pihak yang telah mendukung perjuangan dan perjalanan politik penulis selama ini.

Mengutip ucapan Bung Karno ketika menerima gelar Honoris Causa dari Univeritas Indonesia pada tanggal 2 Februari 1963, bahwa; “Dengan membaca buku, kita dapat bertemu dengan pemikir-pemikir hebat dan memperkaya wawasan serta perspektif kita,”.

Sebagaimana pepatah mengatakan, “ Tiada gading yang tak retak” tentunya Buku ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya penulis dengan senang hati dan terbuka menerima kritik dan saran untuk perbaikan di masa yang akan datang. Merdeka!

Yogyakarta, November 2023